

REFORMASI PENGELOLAAN ASET DAERAH MELALUI UPAYA DIGITALISASI DI WILAYAH DKI JAKARTA

Syifa Rachmania Komara

Department of Vocational School, Padjadjaran University, Sumedang, Indonesia
email : syifa.rachmania@unpad.ac.id

Submitted: 09-07-2025; Accepted: 28-07-2025; Published : 31-07-2025

ABSTRAK

Pengelolaan aset daerah dalam konteks desentralisasi semakin menghadapi tantangan terkait transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Di wilayah Ibu Kota Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks mengingat besarnya nilai aset daerah yang tercatat mencapai Rp746,39 triliun. Upaya reformasi tata kelola aset melalui digitalisasi, seperti pengembangan basis data aset terintegrasi dan interoperabilitas sistem informasi menunjukkan pergeseran strategis dalam pengelolaan sumber daya publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi teknologi digital dalam pengelolaan aset daerah di DKI Jakarta dengan menganalisis kesiapan institusi, kerangka regulasi, dan dampak terhadap tata kelola. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan utama berupa fragmentasi kepemilikan data, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi antar instansi. Meskipun demikian, inisiatif digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas tata kelola aset daerah apabila didukung oleh kepemimpinan yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan sinkronisasi kebijakan yang berkelanjutan. Studi ini memberikan kontribusi terhadap wacana inovasi sektor publik dan menawarkan rekomendasi kebijakan untuk penguatan manajemen aset berbasis digital dalam konteks pemerintahan perkotaan.

Kata kunci: Pengelolaan Aset Daerah; Digitalisasi; Tata Kelola Publik

ABSTRACT

Public asset management in decentralized settings has increasingly faced challenges related to transparency, efficiency, and accountability. In Indonesia's capital region, DKI Jakarta, these challenges are amplified by the scale and value of regional assets, which reach IDR 746,39 trillion. Recent efforts to reform asset governance through digitalization—such as the development of integrated asset databases and system interoperability—present a strategic shift in managing public resources. This study explores the implementation of digital technologies in public asset management in DKI Jakarta, analysing institutional readiness, regulatory frameworks, and governance outcomes. Using a qualitative case study approach supported by interviews with key stakeholders and document analysis, the research identifies critical barriers such as fragmented data ownership, limited human resource capacity, and insufficient coordination among agencies. The findings suggest that while digital initiatives hold significant potential to improve asset governance, their success depends on strong leadership, inter-agency collaboration, and continuous policy alignment. This study contributes to the growing discourse on public sector innovation and offers policy recommendations to strengthen digital-based asset management in urban governance contexts.

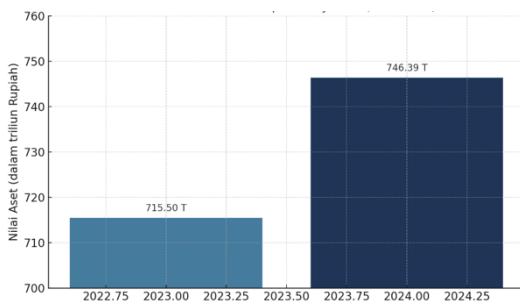
Keywords: Regional Asset Management; Digitalization; Public Governance

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan berkelanjutan. Aset milik pemerintah daerah tidak hanya mencerminkan kekayaan publik, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di tengah kompleksitas urbanisasi dan kebutuhan akan transformasi digital dalam layanan pemerintahan, isu pengelolaan aset daerah semakin mendapat perhatian, terutama di wilayah dengan tingkat akumulasi aset yang tinggi.

Provinsi DKI Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian nasional, merupakan contoh signifikan dalam konteks ini. Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, total nilai aset yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp746,39 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp30,89 triliun dari tahun sebelumnya. Besarnya nilai ini mencerminkan tantangan sekaligus peluang strategis dalam memastikan bahwa seluruh aset tersebut dikelola secara optimal, produktif, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan publik.

Grafik 1. Kenaikan Nilai Aset Pemprov DKI Jakarta (2023-2024)



Sumber: LKPD Pemprov DKI Jakarta, 2025.

Namun demikian, berbagai temuan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah persoalan klasik yang menghambat efektivitas pengelolaan aset daerah, seperti kurangnya pemutakhiran data, rendahnya utilisasi aset, hingga lemahnya integrasi teknologi informasi dalam sistem manajemen aset. Oleh karena itu, upaya reformasi pengelolaan aset daerah melalui digitalisasi menjadi krusial, tidak hanya sebagai respon terhadap kebutuhan efisiensi, tetapi juga sebagai bagian dari

strategi menuju tata kelola berbasis data yang transparan dan partisipatif.

Studi ini berfokus pada dinamika reformasi pengelolaan aset publik di DKI Jakarta melalui pendekatan digitalisasi. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak menyoroti aspek kelembagaan, regulasi, dan kendala birokrasi dalam pengelolaan aset negara, namun masih terbatas yang secara khusus mengkaji integrasi digitalisasi sebagai strategi reformasi manajemen aset secara menyeluruh. Oleh karena itu, studi ini berusaha mengisi celah tersebut dengan menelaah bagaimana digitalisasi dapat menjadi katalisator efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan aset publik di tingkat daerah.

Fokus ini diambil untuk memahami sejauh mana kebijakan, sistem, dan praktik digital telah diimplementasikan, serta tantangan struktural dan kelembagaan yang dihadapi dalam transformasi ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang difokuskan pada upaya reformasi pengelolaan aset publik melalui digitalisasi di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam dinamika kebijakan, kelembagaan, serta implementasi sistem digital dalam pengelolaan aset pemerintah daerah.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yang mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, laporan resmi pemerintah daerah, hasil audit, serta publikasi media daring terkait implementasi digitalisasi Barang Milik Daerah (BMD) di DKI Jakarta. Dokumen yang dianalisis meliputi antara lain Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 103 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Barang Milik Daerah, Laporan Kinerja BPAD DKI Jakarta, serta dokumen evaluatif dari BPK dan Inspektorat Daerah. Pengumpulan dan analisis dokumen dilakukan

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dokumen dari berbagai instansi serta perbandingan antarperiode kebijakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap proses reformasi digital dalam pengelolaan aset publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan telah menjadi agenda penting dalam

mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sektor publik. Dalam konteks pengelolaan aset daerah, digitalisasi tidak hanya dipandang sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai bagian dari upaya reformasi struktural untuk memperbaiki tata kelola barang milik daerah (BMD) yang selama ini identik dengan tumpang tindih data, lemahnya koordinasi antarunit, dan keterlambatan pencatatan.

Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu daerah dengan kompleksitas aset yang tinggi dan tuntutan publik yang besar, menjadi wilayah strategis untuk mengkaji sejauh mana digitalisasi dapat mendorong perbaikan sistemik dalam pengelolaan aset. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika reformasi pengelolaan aset daerah melalui pendekatan digital di DKI Jakarta, dengan menelaah praktik-praktik kelembagaan, kebijakan, serta inovasi teknologi informasi yang diterapkan dalam mendukung transparansi dan akurasi data aset pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan komitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah pengembangan dan implementasi SIPAD (Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah) yang secara strategis diintegrasikan dengan sistem e-BMD (Barang Milik Daerah), e-Planning, dan e-Budgeting.

Hasil audit BPK DKI Jakarta tahun 2023 mencatat bahwa tingkat akurasi pencatatan aset mengalami peningkatan signifikan, dari 61% pada tahun 2020 menjadi 91% pada tahun 2023. Lonjakan ini menunjukkan keberhasilan digitalisasi dalam memperkuat sistem informasi aset, terutama dalam hal validasi data, *real-time monitoring*, dan sinkronisasi lintas unit kerja.

Integrasi SIPAD dengan sistem e-Planning dan e-Budgeting memberikan efek sinergis yang kuat dalam memperkuat siklus tata kelola pemerintahan (*governance cycle*), mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga penatausahaan aset daerah. Melalui keterhubungan ini, setiap proses pengadaan atau pembelian aset dapat secara otomatis dikaitkan dengan dokumen perencanaan dan anggaran yang telah disusun sebelumnya, sehingga menciptakan keterlacakkan (*traceability*) dan konsistensi antar dokumen perencanaan-penganggaran.

Hal ini secara signifikan menekan potensi terjadinya aset yang tidak tercatat, ganda, atau bahkan tidakermanfaatkan (*idle*), yang selama ini menjadi salah satu sumber inefisiensi dalam pengelolaan

barang milik daerah. Selain itu, keterpaduan sistem ini juga berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas karena setiap transaksi aset terekam secara digital dan *real-time*, memungkinkan pengawasan yang lebih efektif oleh auditor internal maupun eksternal. Dalam jangka panjang, integrasi ini menjadi instrumen strategis untuk mencegah pemborosan anggaran daerah dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan nilai tambah yang terukur bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Lebih lanjut, interoperabilitas sistem ini memberikan akses data yang terstandarisasi dan *real-time* bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memfasilitasi proses audit internal maupun eksternal, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kinerja SIPAD juga telah mendapatkan pengakuan publik, di mana dalam Rapat Koordinasi Nasional Barang Milik Daerah tahun 2024, sistem ini disebut sebagai *best practice* digitalisasi aset yang dapat direplikasi oleh daerah lain. Inovasi ini merefleksikan respons positif terhadap tantangan reformasi birokrasi dan efisiensi belanja daerah.

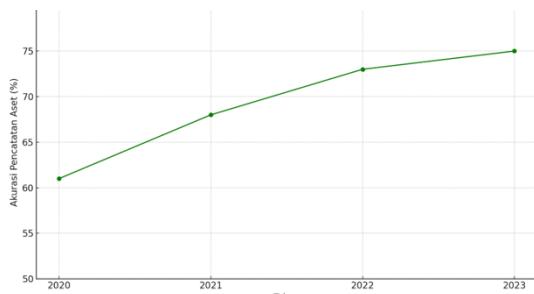
Berdasarkan studi oleh Soesilo & Wahyudi (2022) dalam *Journal of Public Sector Management*, digitalisasi aset dengan pendekatan integratif mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan hingga 34% pada daerah yang menerapkan sistem serupa. Hal ini sejalan dengan temuan di DKI Jakarta, di mana percepatan transformasi digital juga memperkuat transparansi dan mempersempit celah korupsi.

Memasuki tahun 2025, fokus reformasi bergeser pada optimalisasi pemanfaatan aset melalui kecerdasan data. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mengembangkan *dashboard* pengambilan keputusan berbasis data spasial untuk menyajikan pemetaan aset strategis, serta menghubungkan sistem pengelolaan aset dengan platform investasi daerah. Selain itu, kebijakan digitalisasi mendorong keterbukaan informasi publik melalui portal daring yang memungkinkan warga mengakses informasi aset milik pemerintah secara langsung, sebuah langkah progresif dalam mewujudkan prinsip *open government*.

Transformasi digital ini juga berdampak positif terhadap opini BPK atas laporan keuangan daerah. DKI Jakarta kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-7 kalinya pada tahun 2024 dan 2025, memperkuat bukti bahwa pengelolaan aset yang terdigitalisasi mendukung tata

kelola keuangan daerah yang lebih baik.

Grafik 2. Tren Akurasi Pencatatan Aset Daerah DKI Jakarta (2020–2023)



Sumber: BPK, 2025

Grafik ini memperlihatkan peningkatan tren akurasi pencatatan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, akurasi pencatatan aset tercatat sebesar 61%. Nilai ini terus meningkat pada tahun 2021 menjadi 68%, lalu naik lagi menjadi 73% pada tahun 2022. Pada akhir 2023, akurasi pencatatan mencapai 75%.

Peningkatan ini menunjukkan efektivitas digitalisasi pengelolaan aset melalui sistem elektronik seperti SIPAD dan *e-Aset* yang diintegrasikan dengan *e-Planning* dan *e-Budgeting*. BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mencatat bahwa proses pendataan semakin sistematis dan audit menjadi lebih efisien karena data dapat diakses langsung secara digital dan diverifikasi di lapangan bila diperlukan.

Penerapan sistem digital memungkinkan proses audit internal berjalan lebih cepat dan efisien. Walaupun tidak tersedia data persentase formal dalam laporan publik, pejabat BPAD melalui laman resmi menyampaikan bahwa penggunaan aplikasi seperti *e-Laporan BMD* dan *e-PELAPORAN* telah memungkinkan auditor untuk mengakses informasi secara langsung melalui sistem tanpa harus menunggu pengumpulan dokumen fisik. Akses real-time terhadap data ini mempercepat proses verifikasi dan mempermudah pelacakan audit trail, yang pada akhirnya menghemat waktu dan biaya pengawasan internal. Indikasi ini memperkuat argumentasi bahwa digitalisasi mendukung prinsip efisiensi birokrasi.

Dampak positif digitalisasi pengelolaan aset publik juga tercermin dari penurunan jumlah aset yang tidak tercatat atau tidak tercatat secara memadai. Meskipun publikasi resmi belum memuat angka penurunan yang spesifik, laporan dari BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta secara jelas

menyoroti adanya temuan aset tetap tanah yang berpotensi tercatat ganda dan belum menghasilkan pendapatan sewa, serta belum adanya mekanisme pencatatan hibah dari pemangku kepentingan (temuan utama dalam LHP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pencatatan aset sebelumnya belum optimal.

Di sisi lain, pernyataan dari BPAD melalui Kepala Bidang Inventarisasi DKI Jakarta menyatakan bahwa implementasi sistem *e-Aset* telah memungkinkan pendataan aset menjadi “*by system*”, sehingga auditor BPK bisa mengakses data langsung dan melakukan verifikasi hanya bila diperlukan (BPK Perwakilan DKI Jakarta, 2023). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa digitalisasi telah memperkecil kemungkinan aset hilang atau tercatat ganda—dua sebab utama aset tidak tercatat.

Kondisi ini sejalan dengan peran penting kualitas data yang diatur oleh Permendagri No. 47 Tahun 2021 dan Instruksi Sekda DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021, yang menekankan perlunya pemutakhiran data BMD (KIB A–F) yang akurat dan sistematis sebagai syarat penyusunan laporan keuangan daerah berbasis akrual (BPAD Provinsi DKI Jakarta, 2021). Dengan demikian, integrasi antara SIPAD, *e-Aset*, *e-Pelaporan*, dan sistem informasi terkait mencerminkan perbaikan data yang menjadi fondasi transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran daerah.

Lebih jauh, digitalisasi dalam pengelolaan aset daerah juga memperkuat pencapaian prinsip *value for money*, yaitu pemanfaatan sumber daya publik secara ekonomis, efisien, dan efektif sebagaimana ditekankan dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peningkatan akurasi data aset sebagai hasil dari integrasi sistem digital memungkinkan pemerintah daerah mengidentifikasi dan menginventarisasi aset yang sebelumnya tidak tercatat, tidak dimanfaatkan, atau berstatus idle.

Sebagai contoh, laporan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta tahun 2023 menunjukkan bahwa digitalisasi pencatatan aset melalui SIPAD dan *e-BMD* telah membantu memetakan lebih dari 1.200 aset yang berpotensi untuk dioptimalkan kembali, baik melalui alih fungsi internal, penataan ulang kepemilikan, maupun kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga. Aset-aset yang sebelumnya kurang produktif kini dapat diaktifkan kembali sebagai pusat pelayanan publik, ruang terbuka hijau, atau bahkan dikomersialkan secara terbatas sesuai peraturan yang berlaku.

Langkah ini menjadi strategi penting dalam efisiensi fiskal daerah, karena tidak hanya menekan biaya pemeliharaan terhadap aset yang tidak digunakan, tetapi juga membuka ruang bagi peningkatan pendapatan daerah melalui skema pemanfaatan aset, seperti *build-operate-transfer* (BOT), sewa jangka panjang, atau kerja sama pemanfaatan lainnya. Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga menjadi fondasi strategis dalam reformasi keuangan daerah yang berkelanjutan.

Aspek pengawasan dan akuntabilitas dalam tata kelola aset digital turut diperkuat melalui dukungan regulatif dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Keputusan Inspektur Nomor 26 Tahun 2022 memberikan kerangka kerja audit keuangan berbasis digital dengan fokus pada kelengkapan data dalam sistem, keandalan informasi, efektivitas pengendalian internal, serta tindak lanjut atas temuan audit. Kerangka ini menjadi instrumen penting dalam memastikan integritas sistem pencatatan dan pelaporan aset.

Selanjutnya, Keputusan Inspektur Nomor 31 Tahun 2022 menekankan urgensi pemeliharaan sistem informasi pengawasan yang andal, khususnya melalui interoperabilitas antar sub-sistem, pemantapan mekanisme pencadangan (*backup*) data, serta pemantauan terhadap *audit log* yang mendeteksi jejak aktivitas dalam sistem. Ketiga elemen ini merupakan pilar penting dalam menjamin keberlangsungan sistem dan mencegah manipulasi data aset.

Dukungan struktural terhadap penguatan akuntabilitas ini semakin lengkap dengan terbitnya Keputusan Inspektur Nomor 27 Tahun 2022, yang mengatur pelaksanaan pendampingan terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara konsisten di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk unit yang mengelola aset daerah. Pendampingan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga menciptakan budaya pengawasan internal yang adaptif terhadap transformasi digital dan risiko penyimpangan tata kelola. Dengan adanya landasan kebijakan yang komprehensif ini, pengawasan atas pengelolaan aset berbasis digital di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga bersifat preventif dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Reformasi digital dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Provinsi DKI Jakarta memang telah mencatat kemajuan nyata, ditandai dengan penerapan sistem informasi manajemen aset berbasis elektronik, seperti *Sistem Informasi*

Manajemen Barang Daerah (SIMBADA), serta integrasi sistem ini dengan aplikasi e-Planning dan e-Budgeting. Sistem ini dikembangkan untuk memastikan keterhubungan antara proses perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan aset secara lebih transparan dan akuntabel.

Namun demikian, implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan kapasitas kelembagaan. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan evaluasi internal Pemprov DKI Jakarta, beberapa kendala utama yang diidentifikasi meliputi tumpang tindih kewenangan antarorganisasi perangkat daerah (OPD), lemahnya koordinasi lintas sektor, serta belum adanya regulasi teknis yang sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan integrasi digital. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta Tahun 2023, misalnya, mencatat masih ditemukannya ketidaksesuaian data aset antara pencatatan dan kondisi fisik di lapangan akibat ketidakseragaman sistem dan lemahnya *updating* data.

Selain faktor struktural, aspek sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan signifikan. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta dan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dalam Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, ditemukan bahwa sebagian besar pengelola aset di tingkat operasional belum memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam pemanfaatan sistem digital. Literasi digital yang rendah, minimnya pelatihan teknis berkelanjutan, serta tingginya ketergantungan terhadap pihak ketiga (vendor teknologi) dalam pengelolaan dan *troubleshooting* sistem menyebabkan implementasi tidak berjalan secara mandiri dan optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga sangat bergantung pada penguatan regulasi, kapasitas kelembagaan, serta investasi berkelanjutan dalam peningkatan kompetensi SDM pengelola aset.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut sebenarnya telah dirintis, antara lain melalui pelaksanaan bimbingan teknis secara bertahap oleh Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, pengembangan *dashboard monitoring* berbasis *big data* oleh Bappeda, serta kerja sama dengan BPKP dan Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat pengawasan dan kapasitas internal. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga mengintegrasikan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIBMD) dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk

meningkatkan interoperabilitas dan efisiensi pengelolaan aset secara digital. Namun demikian, efektivitas dari berbagai inisiatif ini masih memerlukan evaluasi berkelanjutan, terutama dalam hal dampaknya terhadap akurasi pencatatan, nilai ekonomis aset, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Berdasarkan laporan resmi BPAD dan amanat kebijakan yang ada, terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian utama. BPAD DKI Jakarta menyelenggarakan inventarisasi BMD gedung dan bangunan pada tahun anggaran 2023, yang melibatkan sekitar 620 perangkat daerah/unit kerja dengan 19.388 register gedung dan bangunan. Inventarisasi ini menggunakan aplikasi e-Inventarisasi BMD berbasis desktop dan *mobile*. Meskipun aplikasi ini memudahkan proses pencatatan, bukan berarti seluruh perangkat daerah sudah terintegrasi penuh dalam ekosistem digital tersebut.

Berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, setiap perangkat daerah wajib menyelesaikan pemutakhiran data register gedung pada KIB C secara bertahap hingga akhir tahun 2023. Namun dalam praktiknya, sebagian OPD, terutama yang memiliki register di bawah 100 berpotensi mengalami keterlambatan atau tidak optimal dalam pemanfaatan aplikasi akibat belum adanya koordinasi monitoring yang konsisten antar unit.

Pencatatan asset yang akurat sangat bergantung pada kualitas pengelola aset di OPD. Meskipun belum tersedia data persentase SDM yang sudah mendapat pelatihan, acara sosialisasi dan roadshow inventarisasi BPAD tahun 2023 telah mencakup 152 unit kerja di Jakarta Selatan dan 144 unit kerja lainnya dalam rangka pendidikan penginputan dan pelaporan BMD. Pelatihan ini menjadi dasar awal sekaligus indikator bahwa belum semua perangkat daerah telah terlibat atau sepenuhnya memahami sistem.

Selain itu, *tagline* inventarisasi juga dijadikan bagian dari indikator dalam perjanjian kinerja dan e-TKD (Sistem Evaluasi Kinerja Daerah), dengan potongan e-TKD bagi perangkat daerah yang tidak mencapai target inventarisasi triwulan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem tersedia, implementasi masih perlu dukungan kebijakan insentif agar SDM mau dan mampu beradaptasi.

Secara keseluruhan, digitalisasi pencatatan dan pengelolaan aset daerah di DKI Jakarta menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendukung efisiensi tata kelola dan akuntabilitas

fiskal. Hal ini berdampak langsung terhadap penurunan temuan aset tidak tercatat serta percepatan proses audit internal. Namun demikian, tantangan struktural masih menjadi hambatan utama, khususnya terkait interoperabilitas antar sistem dan kesiapan sumber daya manusia di perangkat daerah. Beberapa OPD belum sepenuhnya terintegrasi secara sistemik, sementara kebutuhan pelatihan dan penguatan budaya kerja berbasis digital masih perlu diakselerasi. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada perangkat lunak dan sistem, tetapi juga pada kesiapan organisasi dan kebijakan penguatan kapasitas SDM yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Digitalisasi melalui SIPAD dan interoperabilitas sistem di DKI Jakarta telah membuktikan efektivitasnya dalam meningkatkan akurasi data dan efisiensi pengelolaan aset. Namun, keberlanjutan digitalisasi ini membutuhkan standarisasi data dan penguatan *governance* untuk memastikan integrasi sistem berjalan konsisten; Pelatihan dan peningkatan kompetensi teknis SDM agar pengguna sistem digital mampu maksimal, serta; Kolaborasi lintas instansi dan perangkat daerah agar integrasi sistem seperti SIPAD dapat berfungsi optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2023, 21 Maret). *BPAD DKI Jakarta gelar sosialisasi inventarisasi BMD TA 2023 bersama Suban Aset Jakarta Selatan* [Berita web]. BPAD DKI Jakarta.
- Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2023, 13 Juni). *BPAD bersama Suku Badan wilayah Jakarta Selatan gelar roadshow inventarisasi BMD TA 2023* [Berita web]. BPAD DKI Jakarta.
- Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2023, 28 November). *BPAD Provinsi DKI Jakarta sukses gelar FGD evaluasi hasil inventarisasi BMD 2023* [Berita web]. BPAD DKI Jakarta.
- Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2024, 30 April). *Sekda DKI Jakarta buka resmi kegiatan inventarisasi BMD peralatan dan mesin TA 2024* [Berita web]. BPAD DKI Jakarta.
- Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2025, 26 Februari). *Sekko Jakarta*

- Barat: manfaatkan inventarisasi ini sehingga menjadi pemetaan yang baik, khususnya sekolah negeri* [Berita web]. BPAD DKI Jakarta.
- Arwani, A., & Priyadi, U. (2025). Digitalization and institutional reform in the public sector: The role of blockchain in public financial transparency and accountability. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 5(1), 303–318.
- Ciancarini, P., Giancarlo, R., & Grimaudo, G. (2023). Digital transformation in the public administrations: A guided tour for computer scientists. *arXiv preprint*.
- Manik, S. P., & Juwono, V. (2023). Strategi transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan: Studi pada Kementerian Keuangan. *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 9(1).
- Putra, K. R., Adni, D. F., & Nasution, M. A. T. P. (2024). Enhancing e-government in digital transformation: Integrating archive management and digital solutions in Pekanbaru, Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Susanto, B., & Yudhistira, M. H. (2025). Pengaruh asset life cycle management terhadap performa aset negara. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 19(1), Artikel 4.
- Susilawati, S., Kurniawati, K., Ilham, D., Sunarsi, D., & Haedar, A. W. (2024). Digital-based public services in public sector organizations in Indonesia. *Jurnal Pallangga Praja*, 6(1), 67–74.
- Toha, S. N., Ghiffari, A., & Irzal, F. (2025). Optimization Strategies for Government Asset Management in Jakarta Using Multi-Criteria Analysis. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(1), 247–256.